



Intress

KPPN  
MADIUN

# BREM

Berita Ekonomi Regional Madiun  
Volume V Tahun 2025



# KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buletin BREM Vol V/2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buletin ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* eksternal maupun internal akan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, antara lain berkaitan dengan kinerja APBN dan APBD pada wilayah kerja KPPN Madiun, opini pegawai, serta lensa peristiwa penting.

Buletin ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus edukasi bagi para pembaca. Selain itu, buletin ini kiranya mampu menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin!



**Kepala KPPN Madiun**



Ditandatangani secara elektronik

**Joko Maryono**

# Berita Ekonomi Regional Madiun

## PELINDUNG

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi Jawa Timur

## PENGARAH

Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono

## PENANGGUNG JAWAB

Fijri Rahmawati

## REDAKTUR

- Agustina Rahayuningtyas
- Hermawan Effendi

## KONTRIBUTOR

- Agustina Rahayuningtyas,
- Hermawan Effendi,
- Anik Mariani,
- Dias Iman Arta,
- Yanuardi Bachtiar,
- Ari Sulastri,
- Affandi Pattangai.



KPPN Madiun



kppn\_madiun



KPPN Madiun



KPPN Madiun



@kppnmadiun



Jalan Salak Nomor 52, Taman Kota Madiun 63131

# DAFTAR ISI



**Kata Pengantar**



**Daftar isi**



**Kinerja APBN  
Wilayah Kerja  
KPPN Madiun**



**Opini**



**Ragam Madiun Raya**



**Pojok Madiun**



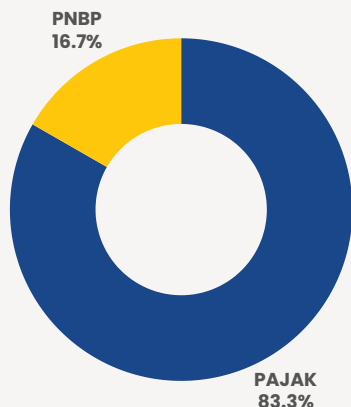
**Pojok Kreasi**



**Rangkuman Kegiatan  
KPPN Madiun  
Januari -Maret 2025**

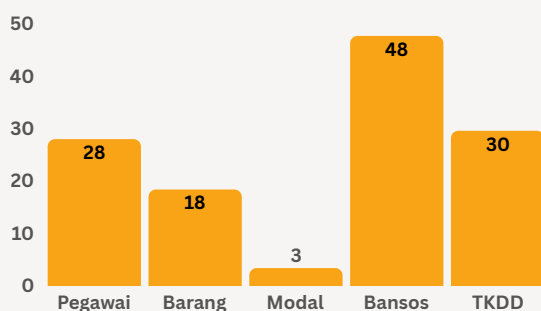
# Kinerja APBN Wilayah Kerja KPPN Madiun s.d. 31 Maret 2025

## A. Pendapatan Negara



Kinerja Pendapatan Negara pada 1 Januari hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp556,62 miliar atau sebesar 306,04% dari target Rp196,47 miliar. Pendapatan dari Perpajakan memiliki porsi pendapatan dengan capaian Rp448,59 miliar atau menurun sebesar 60,1% dibandingkan periode sama tahun 2024 (YoY). Sementara, realisasi PNBP mencapai Rp99,79 miliar, meningkat sebesar 0,10% (YoY).

## B. Belanja Negara

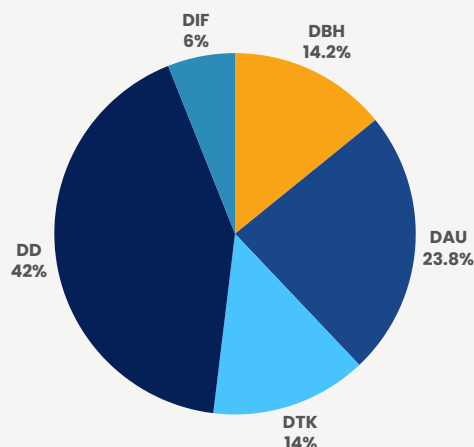


Kinerja Belanja Negara hingga 31 Maret 2025 telah mencapai realisasi 28,25% dari pagu Rp10,66 triliun, meningkat sebesar 6,25% (YoY) jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024.

### B1. Kinerja Belanja K/L

Belanja pemerintah pusat dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Pegawai yang mencapai 27,91% dari pagu anggaran atau mencapai Rp584,8 miliar dan secara YoY turun sebesar 1,3%. Belanja Barang mencapai 18,27% atau Rp116,86 miliar dengan penurunan sebesar 11,63% secara YoY. Belanja modal telah direalisasikan sebesar 3,24% atau sebesar Rp 3,94 miliar dan mengalami penurunan sebesar 7,5% YoY. Sementara, Belanja Bantuan Sosial mencapai 47,66% atau sebesar Rp7,7 miliar, meningkat sebesar 2,85% YoY.

### B2. Kinerja Belanja TKD



**B2. Kinerja Belanja TKD**

Realisasi Penyaluran TKDD per 31 Maret 2025 naik 2,4% dibandingkan dengan periode sama tahun 2024. Secara nominal, penyaluran TKDD mencapai Rp2.298,80 miliar.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp133,31 miliar atau sebesar 18,31 % dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasikan sebesar Rp1.417,67 miliar atau sebesar 30,73% dari pagu. Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik belum ada realisasi. Sementara, Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp268,6 miliar atau 22,06% dari pagu. Dana Desa telah direalisasikan sebesar Rp471,5 miliar atau 54,36% dari pagu. Kemudian, Dana Insentif Fiskal telah direalisasikan sebesar Rp7,6 miliar atau 7,80%.



## OPINI

### ***Memperkuat Komitmen terhadap Kesejahteraan Guru melalui Reformasi Distribusi Tunjangan Profesi***

Oleh: Anik Mariani\*

Di tengah upaya bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, guru merupakan pilar utama yang tak tergantikan. Mereka adalah arsitek masa depan yang membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Maka sudah semestinya negara memberi perhatian lebih pada kesejahteraan mereka, salah satunya melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG).

TPG merupakan bentuk penghargaan atas profesionalisme guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memiliki sertifikat pendidik. Sayangnya, selama bertahun-tahun, tunjangan ini seringkali menjadi sumber kekecewaan. Prosedur yang panjang, keterlambatan pencairan, serta celah penyalahgunaan anggaran menjadi masalah klasik yang seolah tak berujung.

Sebelumnya, dana TPG untuk guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) disalurkan melalui pemerintah daerah, yakni masuk terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum akhirnya diteruskan ke rekening guru.

Prosedur ini bukan hanya tidak efisien, tetapi juga membuka peluang praktik yang merugikan guru—mulai dari keterlambatan lebih dari 14 hari kerja hingga dugaan penggunaan dana yang tidak semestinya.

Lebih menyedihkan lagi, di tengah perjuangan guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik—yang tidak mudah dan tidak semua mendapat kesempatan karena kuota terbatas setiap tahunnya—proses pencairan TPG malah menjadi beban tambahan. Banyak guru bahkan tak sempat menikmati tunjangan ini hingga pensiun, meski telah mengabdikan puluhan tahun.

Untungnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 mengambil langkah berani dengan mereformasi mekanisme penyaluran TPG. Kini, TPG disalurkan langsung ke rekening guru, tanpa melalui RKUD, dan dilakukan setiap bulan, bukan lagi triwulan. Kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada guru—tepat sasaran, lebih cepat, dan bebas dari potensi penyimpangan.





Langkah ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara, yakni transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Reformasi ini juga merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjamin hak guru profesional atas tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan.

Namun, reformasi ini tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Pemerintah pusat dan daerah tetap harus meningkatkan kualitas pendataan dan sistem informasi kepegawaian. Pengawasan harus diperkuat agar tidak ada lagi pungutan liar atau keterlambatan akibat kesalahan administratif. Selain itu, akses terhadap sertifikasi pendidik juga perlu diperluas dan dipermudah, agar lebih banyak guru bisa menikmati hak mereka secara adil.

Tunjangan profesi bukan sekadar nominal dalam slip gaji. Ia adalah wujud pengakuan negara atas pengabdian guru sebagai penjaga peradaban. Sudah saatnya kita menempatkan guru di tempat yang layak—tidak hanya dalam lisan dan slogan, tetapi dalam kebijakan nyata yang menyentuh kesejahteraan mereka.

**\*Penulis adalah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia KPPN Madiun**







## OPINI

### ***Perform with Knowledge Management: Pentingnya Kesadaran Pengelolaan Pengetahuan untuk Kelanjutan Organisasi***

**Oleh: Hermawan Effendi\***

Dalam era informasi yang berkembang pesat, pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) menjadi pilar utama dalam memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi, terutama di sektor pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara yang kompleks memerlukan koordinasi yang baik, pemahaman mendalam terhadap regulasi, serta keterampilan dalam mengelola berbagai instrumen keuangan. Jika tidak ada sistem pengelolaan pengetahuan yang terstruktur, maka pengalaman serta wawasan yang diperoleh oleh pegawai dapat hilang begitu saja ketika terjadi rotasi atau pergantian pegawai. Oleh karena itu, *knowledge management* menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kesinambungan tata kelola keuangan negara serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penerapan *knowledge management* juga berkaitan erat dengan perubahan *mindset* dalam penggunaan teknologi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian pekerjaan.

Di era digital, berbagai sistem informasi telah dikembangkan untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, tanpa adanya *mindset* yang adaptif dan kesiapan dalam memanfaatkan teknologi, implementasi sistem ini bisa menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, *knowledge management* tidak hanya berfokus pada dokumentasi dan distribusi informasi, tetapi juga harus menciptakan ekosistem yang mendorong pemanfaatan teknologi secara maksimal.

### ***Knowledge Management sebagai Mitigasi Perubahan Pegawai***

Dalam organisasi pemerintahan, rotasi pegawai adalah suatu keniscayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu serta mendistribusikan keahlian secara merata. Namun, tanpa sistem *knowledge management* yang baik, rotasi ini dapat menimbulkan disrupsi dalam operasional organisasi. Tanpa dokumentasi dan mekanisme transfer pengetahuan yang sistematis, pengalaman yang berharga dapat hilang bersama pegawai yang berpindah tugas.

Hal ini dapat menghambat kesinambungan pekerjaan, menimbulkan inefisiensi, bahkan memperlambat proses layanan publik.

Dengan menerapkan *knowledge management* yang baik, organisasi dapat mengembangkan sistem yang memastikan setiap pegawai memiliki akses terhadap informasi penting, prosedur kerja, serta pengalaman terdahulu yang telah terdokumentasi dengan baik. Selain itu, adanya mekanisme berbagi pengetahuan, seperti forum diskusi, pelatihan berkelanjutan, dan mentoring dapat menjadi solusi untuk memastikan kesinambungan operasional tanpa kehilangan efektivitas kerja.

Pentingnya *knowledge management* juga terlihat dalam menghadapi tantangan regenerasi pegawai, di mana pegawai baru atau yang mengalami mutasi harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Dengan sistem *knowledge management* yang terstruktur, transisi ini dapat berjalan lebih lancar karena pegawai baru memiliki referensi yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak hanya itu, sistem ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap individu tertentu dalam organisasi, sehingga keberlanjutan proses bisnis tetap terjaga meskipun terjadi perubahan personel.

Selain itu, dalam konteks pemerintahan yang sering menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan, *knowledge management* memungkinkan organisasi untuk mendokumentasikan respons dan strategi yang telah terbukti efektif di masa lalu. Dengan demikian, organisasi tidak perlu memulai dari nol setiap kali ada perubahan, melainkan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah terdokumentasi untuk mengadaptasi strategi dengan lebih cepat dan efisien.

### **Selanjutnya, bagaimana peran strategis *Knowledge Management* di KPPN?**

Sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran pengelolaan keuangan negara disamping menjalankan perannya pada *Regional Economist* dan *Financial Advisor*. Sebagai *Regional Economist*, KPPN dapat menganalisis indikator ekonomi daerah, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data, serta berkolaborasi dengan Pemda dan akademisi. Sementara dalam *Financial Advisory*, peranan KPPN dalam *shadow organization* mendukung bimbingan teknis keuangan, pendampingan pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), serta solusi atas kendala keuangan. Dengan demikian, KPPN tidak hanya berperan sebagai penyalur belanja negara, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu tantangan utama dalam organisasi ini adalah bagaimana mempertahankan dan mentransfer *tacit knowledge*, yaitu pengetahuan yang bersifat tidak tertulis, seperti intuisi dan pengalaman praktis pegawai dalam menangani berbagai permasalahan teknis maupun administratif. *Tacit knowledge* sering kali menjadi faktor pembeda dalam keberhasilan penyelesaian masalah karena sifatnya yang tidak dapat sepenuhnya didokumentasikan dalam prosedur standar. Tanpa strategi *knowledge management* yang jelas, hilangnya pegawai yang berpengalaman dapat mengakibatkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam organisasi. Oleh karena itu, KPPN perlu memastikan bahwa transfer pengetahuan terjadi secara berkesinambungan melalui mekanisme mentoring, pelatihan, serta dokumentasi prosedur yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh.

Organisasi yang menjalankan proses bisnisnya dengan menerapkan *knowledge management* akan memiliki berbagai keunggulan, antara lain:

- Dengan adanya sistem *knowledge management* yang terstruktur, pegawai dapat dengan mudah mengakses informasi dan prosedur kerja yang sudah terdokumentasi. Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dan meningkatkan produktivitas.
- *Knowledge management* memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data, pengalaman, serta praktik terbaik yang telah terdokumentasi. Dengan begitu, risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan.
- Organisasi yang memiliki sistem pengelolaan pengetahuan dapat lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan kebijakan baru. Pengetahuan yang terdokumentasi membantu pegawai memahami perubahan dan beradaptasi dengan lebih mudah.
- Dengan adanya budaya berbagi pengetahuan, organisasi mendorong inovasi dan kreativitas. Pegawai didorong untuk saling berbagi ide serta mengembangkan solusi baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada.
- *Knowledge management* memastikan bahwa informasi penting tidak hilang seiring dengan pergantian pegawai. Proses transfer pengetahuan yang terstruktur memungkinkan organisasi tetap berjalan dengan optimal meskipun terjadi perubahan personel.

**Organisasi yang sudah menerapkan *knowledge management* lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur**



Sebagai langkah nyata dalam mengelola pengetahuan secara efektif, KPPN Madiun telah mengembangkan Sistem Informasi Pelatihan (SILAT) 033. Sistem ini dirancang untuk menatausahakan berbagai kegiatan *sharing knowledge* yang dilakukan oleh pegawai KPPN Madiun, sehingga pengalaman dan wawasan yang telah diperoleh dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi referensi bagi pegawai lain. SILAT033 berperan sebagai *platform* terintegrasi yang memungkinkan pegawai mengakses informasi terkait prosedur kerja, praktik terbaik, serta materi pelatihan yang telah dikumpulkan dan dikurasi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat budaya berbagi pengetahuan di lingkungan kerja. Dengan adanya sistem ini, pegawai baru dapat lebih cepat beradaptasi dan memahami tugas mereka tanpa harus bergantung sepenuhnya pada interaksi langsung dengan senior.

SILAT033 atau Sistem Informasi Pelatihan KPPN Madiun merupakan inovasi yang dibuat untuk mendukung terciptanya *Knowledge management System* (KMS) dalam rangka upaya *transfer knowledge* antarpegawai.

Fokus utama yang menjadi fitur dari Aplikasi SILAT033 ini adalah pendokumentasian kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), rapat *online* maupun *offline* yang menjadi sifatnya *mandatory* bagi pegawai KPPN Madiun, dan kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Dengan memanfaatkan fitur tersebut, poin penting yang menjadi pembahasan akan terdokumentasikan dengan baik sehingga menjadi *knowledge* bagi pegawai lainnya sebagai upaya peningkatan pengetahuan. SILAT033 mempunyai *insight* sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi pegawai terutama dalam mendukung tugas dan fungsi sehari-hari dengan mengacu pada prinsip *continuous improvement*. Dengan adanya inovasi SILAT033, pembaharuan pengetahuan pegawai akan lebih merata sehingga dapat menciptakan SDM yang mempunyai *knowledge* yang unggul dalam melaksanakan pelayanan kepada *stakeholder* KPPN Madiun.

Keberhasilan implementasi SILAT 033 menunjukkan bahwa *knowledge management* dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi tantangan perubahan pegawai. Selain itu, sistem ini juga menjadi bukti bahwa inovasi berbasis teknologi dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi secara lebih sistematis.

## Simpulan

*Knowledge management* bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan kebutuhan strategis yang harus diterapkan dalam setiap organisasi pemerintahan yang ingin tetap adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan sistem pengelolaan pengetahuan yang baik, organisasi dapat mengurangi dampak perubahan pegawai, memastikan kelangsungan proses bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan publik. KPPN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara perlu terus mengembangkan strategi *knowledge management* untuk menjawab tantangan operasional yang semakin kompleks. Implementasi SILAT 033 oleh KPPN Madiun adalah contoh nyata bagaimana inovasi berbasis teknologi dapat membantu dalam mendokumentasikan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan secara lebih efektif. Dengan kesadaran dan implementasi yang tepat, *knowledge management* akan menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi yang lebih kuat, responsif, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

\*Penulis adalah Pelaksana Seksi Bank KPPN Madiun



**Opini**  
**THR, Tentang Tradisi dan Stimulus Ekonomi**  
**Oleh: Agustina Rahayuningtyas\***

*"Hari ini hari kesadaran akan tradisi  
Menyempatkan umat sejenak bersama-sama  
Menghirup udara lega dalam kepungan derita  
Sehari-hari yang bikin orang jauh-menjauhi."  
(Ajip Rosidi dalam puisi Hari Lebaran)*

Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri menjadi hari-hari yang disambut berbagai kalangan dengan semarak tiap tahunnya. Tidak hanya karena alasan religius, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dari segenap penjuru, momen tersebut biasanya identik dengan keramaian warga berburu takjil di sore hari menjelang buka puasa, keseruan membeli pakaian baru di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan, kesibukan memproduksi atau menyiapkan menu-menu untuk suguhan atau oleh-oleh, hingga kepadatan perantau untuk mudik ke kampung halaman.

Lonjakan kebutuhan untuk momen tersebut tentunya mensyaratkan sumber daya yang lebih besar dari hari-hari lainnya. Untuk membeli takjil, pakaian baru, oleh-oleh, tiket perjalanan mudik, hingga memberikan sedekah bagi sesama, masyarakat membutuhkan dana yang lebih banyak dibanding bulan lainnya. Untuk itu, ada satu dukungan yang identik juga dengan momen tersebut, yakni pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada para pekerja.

Menurut antropolog dari Universitas Airlangga, Djoko Adi Prasetyo, tradisi pemberian uang yang menjadi cikal bakal budaya THR di Indonesia diyakini berasal dari Timur Tengah. Tradisi tersebut kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia dan kemungkinan diterapkan sebagai wujud sedekah sesuai ajaran agama Islam. Terdapat pula catatan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 sampai ke-18 yang menunjukkan bahwa terdapat kebiasaan para raja serta bangsawan untuk memberi uang baru kepada anak-anak para pengikutnya saat hari raya Idulfitri. Pemberian itu dipandang sebagai bentuk syukur, khususnya setelah mereka berpuasa selama sebulan penuh (Unairnews, 2024).

Kemudian, meski tak begitu terang kapan pertama kali istilah THR digunakan, tradisi THR berkembang menjadi sesuatu yang diresmikan oleh negara menjadi berkekuatan hukum. Adalah kabinet Soekiman Wirjosandjojo yang pertama kali menetapkan kebijakan pemberian THR bagi pamong praja (saat ini PNS) pada tahun 1951 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sumber lain menyatakan bahwa pemberian tersebut juga ditujukan agar para pamong praja mendukung keberadaan kabinet. Dengan kebijakan tersebut, di akhir bulan Ramadhan, pegawai diberi tunjangan sebesar Rp125 hingga Rp200.



Karena hanya pamong praja yang diberi tunjangan, kebijakan tersebut memicu protes dari kaum buruh sehingga ada pemogokan buruh pada tahun 1952 untuk menuntut pemberian tunjangan yang sama bagi buruh (Harahap, 2025; Nancy, 2024; Triyana, 2011; Zara, 2021). Pada tahun 1994, yakni melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, akhirnya hak buruh atas THR resmi diatur (Nancy, 2024).

Pemberian tunjangan tersebut tidak selalu mulus. Pada tahun 1959, diberitakan bahwa pegawai negeri tidak mendapat THR karena keuangan negara sedang sulit akibat pemberontakan PRRI/Permesta (Zara, 2021).

Kini, setelah sekian puluh tahun berlalu, pemberian THR sudah jamak dipandang sebagai tradisi sekaligus kewajiban untuk mengapresiasi para pegawai. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian THR bagi para aparatur negara, anggota TNI/Polri, hingga para karyawan swasta. Bahkan, perusahaan yang tidak memberikan THR bisa diberi sanksi oleh pemerintah. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemberian THR juga diharapkan mampu menjadi stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat (Harahap, 2025; Kemenkeu, 2025; Nugraha, 2022).

### **Perkembangan Pembayaran THR di Wilayah KPPN Madiun**

Kebijakan pemberian THR tahun 2025 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Aparatur negara meliputi antara lain PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pegawai non-pegawai aparatur sipil negara. Jumlah penerimanya mencapai sekitar 9,4 juta orang dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran THR tersebut sekitar Rp49,4 triliun (Kemenkeu, 2025).

Pembayaran THR 2025 sendiri diatur agar dilakukan pada bulan Maret 2025, baik untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, maupun pegawai swasta. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui KPPN, pencairan dilakukan mulai tanggal 17 Maret 2025. Di wilayah KPPN Madiun, hingga 10 April 2025, pembayaran THR 2025 melalui KPPN Madiun telah mencapai Rp125,8 miliar untuk sekitar 20.353 penerima. Jumlah ini diperkirakan masih akan meningkat sebab masih ada pengajuan SPM THR di bulan April 2025 pascalibur Hari Raya Idulfitri.

Kebijakan pemberian THR, setidaknya selama 2020 hingga 2025, tak selalu serupa tiap tahun. Di tahun 2020 dan 2021, THR yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan kinerja. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023, THR tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 50 persen sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Pada tahun 2024 dan 2025, THR tunjangan kinerja ditetapkan dibayarkan penuh. Selain itu, di 2025, untuk pertama kalinya diterapkan pembayaran THR untuk PPPK secara proporsional sesuai bulan bekerjanya. Dengan demikian, apabila pegawai belum genap bekerja selama setahun, hak THR-nya tidak sebesar penghasilan sebulan. Dinamika kebijakan tersebut turut memengaruhi besaran THR yang dibayarkan tiap tahun.

Karena hanya pamong praja yang diberi tunjangan, kebijakan tersebut memicu protes dari kaum buruh sehingga ada pemogokan buruh pada tahun 1952 untuk menuntut pemberian tunjangan yang sama bagi buruh (Harahap, 2025; Nancy, 2024; Triyana, 2011; Zara, 2021). Pada tahun 1994, yakni melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, akhirnya hak buruh atas THR resmi diatur (Nancy, 2024).

Data selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa secara nominal, THR yang dibayarkan melalui KPPN Madiun cenderung meningkat tiap tahun. Sementara itu, jumlah penerimanya tiap tahun rata-rata sekitar 19.700 orang. Rincian pembayaran THR selama 2020–2025 di wilayah KPPN Madiun adalah sebagaimana tabel berikut.

Tahun	Bulan Pembayaran THR	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Jumlah Penerima (orang)*
2020	Mei	72	19.009
2021	Mei	76	18.746
2022	April	90,3	19.852
2023	April	94,5	20.092
2024	Maret	126,1	20.433
2025**	Maret	125,8	20.353

\*) jumlah penerima diestimasi dari jumlah PNS/TNI/Polri/PPPK/PPNPN yang menerima gaji bulanan

\*\*) per tanggal 10 April 2025

Sumber data: OM SPAN, diunduh tanggal 10 April 2025 (diolah)

Mengacu pada data BPS mengenai laju pertumbuhan ekonomi (y-o-y) triwulanan menurut pengeluaran pada wilayah-wilayah kerja KPPN Madiun, yakni Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Ngawi, diketahui bahwa pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan di triwulan II pada wilayah-wilayah tersebut merupakan yang tertinggi dalam tahun berkenaan (kecuali Kota Madiun yang pertumbuhan tertinggi di 2024 adalah pada triwulan IV). Kondisi tersebut tak lepas dari momen Hari Raya Idulfitri pada tahun-tahun tersebut yang jatuh pada bulan April-Mei atau di triwulan II. Pembayaran THR yang dilakukan sebelum Hari Raya, baik untuk aparatur negara maupun pekerja swasta, menjadi bekal penting untuk mendorong bergeliatnya perekonomian di momen tersebut.

### THR dan Stimulus Ekonomi

Ekonom dari Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa pemberian THR kepada ASN/TNI/Polri hingga pegawai swasta memberi multiplier effect yang positif bagi perekonomian karena akan mendorong permintaan barang atau konsumsi (Antara, 2025a). Data menunjukkan bahwa setiap THR telah dicairkan, konsumsi rumah tangga yang ditunjukkan oleh indeks penjualan ritel akan meningkat secara signifikan dibanding bulan sebelum pemberian THR (Ardhanie, 2025). Kondisi tersebut kemudian akan mendorong peningkatan aktivitas produksi dan, tak pelak, juga mendorong kenaikan harga-harga barang. Namun, menurut ekonom Indef, Esther Sri Astuti, adanya pemberian THR akan bermanfaat menjadi bantalan yang akan melindungi masyarakat dari lonjakan kenaikan harga tersebut (Antara, 2025b).

Di sisi lain, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economic berpandangan bahwa efek THR kepada ASN/TNI/Polri tidak signifikan terhadap perekonomian. Hal tersebut mengingat jumlah ASN/TNI/Polri tak sampai 5 persen dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Kelompok pekerja yang mendominasi di Indonesia adalah pekerja selain abdi negara (Florentin, 2025). Untuk itu, dorongan yang lebih kuat kepada perekonomian diharapkan datang dari efek pemberian THR kepada para pekerja tersebut. Dengan demikian, penting pula untuk menjaga agar sektor swasta tetap produktif dengan menjamin tersedianya kondisi usaha yang kondusif.

Seperti dikatakan sastrawan Ajip Rosidi di atas, momen lebaran perlu menjadi momen yang memungkinkan segenap masyarakat untuk bisa bersama-sama menghirup udara lega. Kebijakan pemberian THR bagi aparatur negara maupun pekerja swasta menjadi salah satu pemantik penting untuk mewujudkannya.

\*) Penulis adalah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Madiun

#### Referensi:

- Antara. (2025a). Celios: Pemberian THR kepada ASN beri efek positif ke ekonomi daerah. <https://www.antaranews.com/berita/4705713/celios-pemberian-thr-kepada-asn-beri-efek-positif-ke-ekonomi-daerah>
- Antara. (2025b). Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga. <https://www.antaranews.com/berita/4705625/ekonom-indef-sebut-thr-asn-jadi-bantalan-hadapi-lonjakan-harga>
- Ardhanie, N. D. (2025). Lebih dari Sekadar Bonus: THR sebagai Pendorong Ekonomi. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4464-lebih-dari-sekadar-bonus-thr-sebagai-pendorong-ekonomi.html>
- Florentin, V. (2025). Efek Minim THR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/efek-thr-ke-pertumbuhan-ekonomi-1216207>
- Harahap, M. H. E. S. (2025). Sejarah di balik tradisi pemberian THR di Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/4716521/sejarah-di-balik-tradisi-pemberian-thr-di-indonesia>
- Kemenkeu. (2025). Siaran Pers: THR 2025: Apresiasi Bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/THR-2025-Apresiasi-Bagi-Aparatur-Negara-%28%29>
- Nancy, Y. (2024). Sejarah THR, Ketahui Makna dan Tradisinya di Indonesia. <https://tirto.id/sejarah-thr-ketahui-makna-dan-tradisinya-gXsm>
- Nugraha, D. W. (2022). THR Jadi Stimulus Pemulihan Ekonomi. Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/17/thr-jadi-stimulus-pemulihan-ekonomi>
- Triyana, B. (2011). THR, Waktu, dan Uang. <https://historia.id/ekonomi/articles/thr-waktu-dan-uang-DLKQ6/page/1>
- Unairnews. (2024). Pakar Antropologi Ungkap Tradisi Penggunaan Uang Baru untuk THR. <https://unair.ac.id/pakar-antropologi-ungkap-tradisi-penggunaan-uang-baru-untuk-thr/>
- Zara, M. Y. (2021). Ketika THR Bikin Geger. <https://historia.id/ekonomi/articles/ketika-thr-bikin-geger-vJyMB>
- Sumber lain:  
<https://spanint.kemenkeu.go.id>, diakses 10 April 2025
- <https://madiunkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEzIzI=/laju-pertumbuhan--y-on-y--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-kota-madiun--persen-.html>, diakses 11 April 2025
- <https://madiunkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4IzI=/laju-pertumbuhan--y-on-y--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-kabupaten-madiun--2022--2024--persen--persen-.html>, diakses 11 April 2025
- <https://ngawikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYxIzI=/laju-pertumbuhan--y-on-y--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-ngawi--persen-.html>, diakses 11 April 2025
- <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU0IzI=/laju-pertumbuhan--y-on-y--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-kabupaten-magetan--persen-.html>, diakses 11 April 2025
- <https://ponorogokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/laju-pertumbuhan--y-on-y--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-kabupaten-ponorogo--persen-.html>, diakses 11 April 2025





**Opini**  
**PUG di KPPN Madiun:**

**Fondasi Strategis Menuju Organisasi Berkeadilan**

**oleh: Affandi Pattangai\***

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Madiun merupakan langkah progresif yang mencerminkan komitmen nyata instansi pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender. Penandatanganan Komitmen Bersama terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 secara digital melalui Aplikasi Satu Kemenkeu oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Madiun pada tanggal 26 Februari 2025, tidak hanya menunjukkan kesiapan KPPN Madiun dalam beradaptasi dengan transformasi digital, tetapi juga mempertegas bahwa nilai-nilai kesetaraan gender kini menjadi bagian integral dari budaya kerja.

Langkah ini sangat penting, mengingat implementasi PUG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi strategis dalam menciptakan tata kelola organisasi yang responsif terhadap kebutuhan seluruh pegawai, tanpa memandang gender. Komitmen seluruh pejabat dan pegawai KPPN Madiun untuk terus menyebarluaskan nilai-nilai PUG kepada mitra kerja juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang patut diapresiasi, karena manfaat pembangunan yang berkeadilan akan lebih terasa apabila seluruh pihak turut serta dalam prosesnya.

Konsistensi dan keberlanjutan dalam implementasi PUG akan menjadi kunci keberhasilan. Harapannya, KPPN Madiun dapat menjadi contoh inspiratif bagi satuan kerja lainnya, bahwa integrasi perspektif gender dalam setiap proses kerja bukan hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang adil bagi semua.

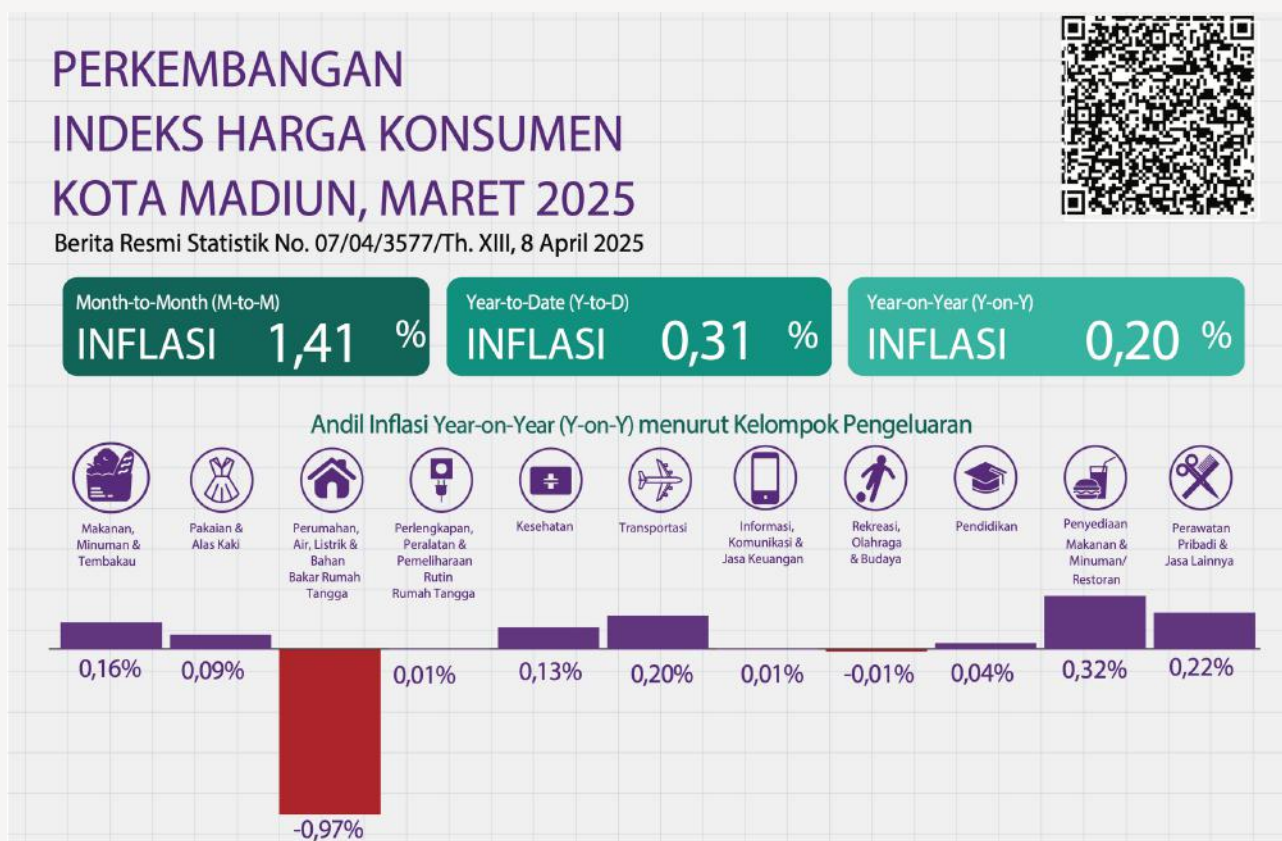
\*Penulis adalah Pelaksana Subbagian Umum KPPN Madiun

## Ragam Madiun Raya

# Inflasi Kota Madiun pada Maret 2025 Sebesar 0,20 Persen


- Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik dari BPS Kota Madiun tanggal 8 April 2025, inflasi *year on year* (y-on-y) bulan Maret 2025 adalah sebesar 0,20 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,33.
- Tingkat inflasi y-on-y untuk Maret 2024 dan Maret 2023 masing-masing sebesar 3,05 persen dan 5,15 persen.
- Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Kota Madiun bulan Maret 2025 masing-masing sebesar 1,41 persen dan 0,31 persen.
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,54 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,10 persen.
- Selanjutnya, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,62 persen; kelompok transportasi sebesar 1,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,54 persen.

Sumber: BPS Kota Madiun,  
<https://madiunkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/04/08/222/pada-maret-2025--inflasi-year-on-year--y-on-y--kota-madiun-sebesar-0-20-persendengan-indeks-harga-konsumen--ihk--sebesar-106-33-.html>



## **Pojok Madiun**

# **Masjid Besar Kuno Taman, Masjid Tertua di Kota Madiun**



Masjid Kuno Taman Madiun, yang terletak di kawasan Kota Madiun, memiliki sejarah panjang yang mengakar kuat dalam perkembangan agama Islam di Kota Madiun. Masjid ini dibangun pada tahun 1754 oleh Kyai Ageng Misbach, yang juga dikenal sebagai Kyai Donopuro. Pada awalnya, masjid ini bernama Masjid Donopuro dan didirikan di atas tanah perdikan, yakni tanah bebas pajak, yang diberikan oleh Kerajaan Mataram kepada Raden Ronggo Prawiradirja I, Bupati Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta.

Tanah perdikan yang diberikan kepada Raden Ronggo kemudian diserahkan kepada Kyai Ageng Misbach, yang kala itu menjabat sebagai penasihat Raden Ronggo. Melalui masjid ini, syiar agama Islam mulai berkembang pesat di wilayah Karesidenan Madiun, menjadi pusat keagamaan dan budaya bagi masyarakat sekitar.

Pada tahun 1981, masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia, mengingat nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai bagian dari perlindungan terhadap warisan sejarah, nama masjid pun diubah menjadi Masjid Besar Kuno Taman Madiun. Sejak saat itu, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol warisan sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya.

Masjid Kuno Taman Madiun yang terletak di Jalan Asahan Nomor 46, Taman, Kec. Taman, Kota Madiun—sekitar 650 meter dari KPPN Madiun—tidak hanya terkenal karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena arsitekturnya yang khas. Dengan bangunan utama yang terbuat dari kayu jati dan atap tajug, masjid ini memiliki tiga pintu utama serta serambi yang dihiasi dengan pilar-pilar besar. Beberapa bagian asli bangunan masjid masih dipertahankan hingga saat ini, menjadikannya sebagai salah satu contoh arsitektur masjid tradisional yang sangat bernilai.

Selain itu, masjid ini memiliki tradisi yang khas, seperti perayaan 1 Muharam dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan penyajian makanan tradisional yang sarat makna simbolis. Makanan-makanan tersebut melambangkan kebeningan jiwa dan harapan akan keselamatan dan kesejahteraan. Masjid ini juga dikenal sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara keagamaan dan kebudayaan, yang mempererat hubungan antara masyarakat dan warisan leluhur mereka.

Dengan segala keunikan dan nilai sejarahnya, Masjid Kuno Taman Madiun terus menjadi saksi perkembangan Islam di wilayah Madiun serta upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada.

# Pojok Kreasi

## Bulan Suci Menyapa

Ciptaan: Gema

Dalam sunyi malam yang bersahaja,  
datang cahaya dari langit yang mulia.  
Ramadan tiba, mengetuk jiwa,  
mengajak hati 'tuk lebih peka.

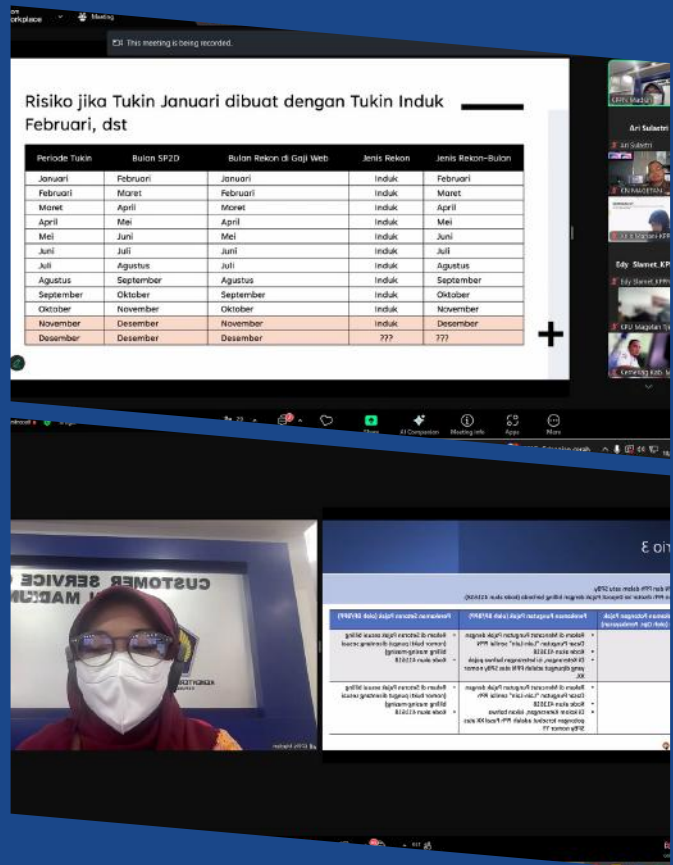
Lapar dan dahaga bukan semata,  
tapi latihan jiwa menahan segala.  
Mulut dijaga, hati disaring,  
agar hidup lebih bening.

Ayat suci dibaca penuh cinta,  
tangan menengadah dalam doa.  
Ampunan Ilahi jadi harapan,  
di bulan suci penuh keberkahan.  
Sahur tenang, buka penuh syukur,  
masjid ramai, langit pun akur.

Setiap malam jadi kesempatan,  
mendekat pada Tuhan tanpa beban.  
Ya Ramadan, jangan cepat berlalu,  
bimbing kami sampai waktu bersatu.  
Agar saat engkau pergi nanti,  
tinggalkan hati yang lebih suci.



## Rangkuman Kegiatan KPPN Madiun Bulan Januari-Maret 2025



- KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2024 (24 Januari 2025)
- Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (21 Februari 2025)
- Penandatanganan komitmen implementasi PUG tahun 2025 di KPPN Madiun (26 Februari 2025)
- Sosialisasi Pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan nomor SE-6/PB/2023 tanggal 9 September 2023 hal Petunjuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada K/L melalui Aplikasi Gaji (18 Maret 2025)

Melalui kegiatan ini, KPPN Madiun berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan mempertahankan prestasi di tahun-tahun mendatang.



**INDONESIAN TREASURY**